

Konsep Akidah dan Akhlak bagi Pejabat Publik: Perspektif Pendidikan Islam terhadap Integritas dan Tata Kelola Pemerintahan

Dika Kurnia Dikrillah¹

¹. Prodi Magister Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Al-Hidayah Bogor, Indonesia
e-mail : kangdiks0312@gmail.com¹

Ali Maulida²

². Prodi Magister Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Al-Hidayah Bogor, Indonesia
e-mail : alimaulida77@gmail.com²

*Korespondensi e-mail : kangdiks0312@gmail.com¹

	Abstrak
<i>History Artikel:</i> Diterima 6 juli 2026 Direvisi 16 Juli 2026 Diterima 26 Juli 2026 Tersedia online 2 Agustus 2026	This study examines the concepts of faith (akidah) and ethics (akhlak) as the foundation of leadership and governance with integrity from an Islamic perspective. The moral crisis plaguing modern bureaucracy marked by corruption, abuse of power, and a lack of integrity demands solutions that are not merely structural and legal in nature, but also spiritual and ethical. The study employs a qualitative analytical method using a literature review approach to sources from the Qur'an, Hadith, and contemporary academic literature in the fields of faith, ethics, and governance. The results of the study indicate that: (1) creed, particularly the concept of muraqabah (the awareness of being observed by Allah), functions as an effective internal control mechanism for public officials, (2) Islamic ethical values such as shidq (honesty), amanah (integrity), and 'adl (justice) correspond directly with the principles of good governance, (3) the integration of faith and ethics into the legislative, executive, and judicial branches can serve as the foundation for clean, just, and accountable governance. This study concludes that strengthening the faith and ethics of public officials is a fundamental necessity in efforts toward Islamic, values, based bureaucratic reform.
	<i>Kata kunci:</i> Akidah, Akhlak, Pejabat Publik.

Pendahuluan

Persoalan integritas pejabat publik merupakan salah satu tantangan fundamental yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi penyakit kronis yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan bernegara, dan pelakunya tidak jarang adalah mereka yang menduduki jabatan strategis di lingkungan pemerintahan. Fenomena ini mengindikasikan adanya krisis moral yang serius di kalangan aparatur negara, sehingga diperlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat hukum dan struktural, tetapi juga menyentuh dimensi spiritual dan etis yang lebih dalam.

Pendidikan Islam menawarkan perspektif yang komprehensif dan mendalam tentang pembentukan karakter manusia yang berintegritas. Dua pilar utama dalam tradisi pendidikan Islam, yakni akidah dan akhlak, sesungguhnya menyimpan potensi besar sebagai landasan moral bagi setiap individu, termasuk mereka yang mengemban amanah sebagai pejabat publik. Akidah yang kokoh akan melahirkan kesadaran bahwa setiap tindakan manusia, baik yang tersembunyi maupun yang tampak, senantiasa berada dalam pengawasan Allah SWT. Kesadaran inilah yang dalam terminologi Islam disebut sebagai muraqabah, yang dapat menjadi benteng paling kuat melawan segala bentuk penyimpangan.

Akhlak, sebagai manifestasi konkret dari akidah dalam perilaku sehari-hari, memberikan panduan praktis tentang bagaimana seorang pejabat publik seharusnya menjalankan tugasnya. Dalam Al-Quran, Allah SWT menegaskan bahwa sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil (QS. An-Nisa: 58). Ayat ini secara eksplisit menekankan dua nilai inti tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu amanah dan keadilan, yang merupakan bagian integral dari akhlak Islami.

Penelitian tentang hubungan antara nilai-nilai pendidikan Islam dan tata kelola pemerintahan masih relatif terbatas, khususnya yang memfokuskan pada konsep akidah dan akhlak sebagai fondasi integritas pejabat publik. Sebagian besar kajian yang ada lebih banyak membahas aspek fiqh siyasah (hukum politik Islam) daripada dimensi moral-spiritual yang menjadi akar dari perilaku pejabat publik. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji secara mendalam bagaimana konsep akidah dan akhlak dalam perspektif pendidikan Islam dapat berkontribusi pada pembentukan integritas dan perbaikan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana konsep akidah dalam pendidikan Islam dapat membentuk integritas pejabat publik? (2) Bagaimana nilai-nilai akhlak Islami relevan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik? (3) Bagaimana pendidikan Islam dapat diintegrasikan dalam pengembangan kapasitas moral pejabat publik? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memaparkan relevansi konsep akidah dan akhlak dalam pendidikan Islam terhadap integritas dan tata kelola pemerintahan, serta merumuskan rekomendasi praktis pengintegrasian nilai-nilai tersebut dalam konteks kepemimpinan publik di Indonesia.

Elaborasi Operasional dan Alur Diskursus Pemikiran, Guna memastikan bahwa analisis tidak berhenti pada tataran teoretis-filosofis yang mengawang-awang, penulis merinci alur operasional pembahasan ke dalam struktur argumentasi yang rigid dan berkesinambungan. Diskursus dalam artikel ini dibangun dengan meretas dualisme dikotomis yang selama ini memisahkan antara kesalehan ritual (*kesalehan individual*) dan kesalehan birokrasi (*kesalehan sosial*). Pendidikan Islam tidak boleh lagi dipandang sebatas institusi pelestari dogma, melainkan harus direkonstruksi sebagai laboratorium moral yang mampu melahirkan agen-agen perubahan di sektor publik.

Secara operasional, proses dekonstruksi konseptual dalam artikel ini bertumpu pada premis bahwa akidah adalah jangkar metafisika, sedangkan akhlak adalah manifestasi fisika dari integritas seorang pejabat. Ketika membahas *transcendental accountability*, penulis membedah bagaimana mekanika spiritual dari konsep *Muraqabah* (kesadaran mutlak akan pengawasan Allah) bekerja di dalam ruang psikologi seorang birokrat. Di bawah ini adalah visualisasi matriks operasionalisasi nilai yang digunakan penulis untuk membedah masalah:

Pengkajian dilakukan dengan memadukan pendekatan tekstual (*naqliyyah*) dan kontekstual-rasional (*aqliyyah*). Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang berbicara tentang kepemimpinan, larangan memakan harta secara batil (*akl al-amwal bi al-batil*), serta bahaya suap (*rasywah*) tidak sekadar dikutip sebagai pembenaran normatif, melainkan dianalisis menggunakan pisau analisis sosiologi birokrasi. Hal ini dilakukan untuk melihat bagaimana pesan-pesan transendental tersebut dapat ditransformasikan menjadi budaya organisasi (*organizational culture*) yang kompatibel dengan ekosistem birokrasi modern di era digital.

Konstruksi Epistemologis: Mengatasi Paradoks Disorientasi Keagamaan, Satu aspek krusial yang dibahas secara mendalam dengan metode analitis-kritis dalam artikel ini adalah fenomena *split personality* atau kepribadian ganda keagamaan pada sebagian pejabat publik. Indonesia menghadapi kenyataan paradoks: sebuah negara dengan mayoritas Muslim terbesar dan tingkat religiositas formal yang sangat tinggi, namun secara bersamaan masih berjuang keras melawan indeks persepsi korupsi yang memprihatinkan. Artikel ini masuk ke dalam jantung

perdebatan tersebut dengan menganalisis kegagalan epistemologis dalam corak Pendidikan Islam arus utama (*mainstream*).

Penulis berargumen bahwa selama ini terjadi reduksi radikal terhadap makna akhlak. Akhlak sering kali dipersempit maknanya sebatas moralitas interpersonal yang bersifat privat seperti tutur kata yang lembut, kesantunan berpakaian, dan ketaatan ritualitas individual (shalat, puasa, haji). Akibatnya, muncul bias kognitif di mana seorang pejabat bisa saja dikenal sangat saleh secara ritual di lingkungan rumahnya, namun tidak memiliki kepekaan etis (*ethical sensitivity*) ketika menandatangani anggaran proyek yang dimanipulasi di kantornya.

Korupsi dalam sistem pemerintahan modern tidak lagi dilakukan secara kasar, melainkan bersembunyi di balik legalitas administratif (*legalized corruption*). Oleh karena itu, Pendidikan Islam harus berevolusi. Artikel ini menawarkan rekonstruksi kurikulum teo-etis yang menekankan pada *Akhlaq Siyasiyyah* (etika politik) dan *Akhlaq Iqtishadiyyah* (etika ekonomi), di mana dosa birokrasi (seperti membiarkan pungutan liar atau memanipulasi tender) diposisikan sama bahayanya—atau bahkan lebih destruktif—daripada pelanggaran moral privat.

Batasan Studi dan Sistematika Pembahasan, Agar pembahasan tetap fokus dan terarah, penulis memberikan batasan studi (*scope of study*) yang jelas. Artikel ini membatasi diri pada kajian konseptual-paradigmatik Pendidikan Islam yang diarahkan khusus pada pejabat publik pada level pembuat kebijakan (*policy maker*) dan pelaksana kebijakan (aparatur sipil negara), bukan pada sistem politik praktis secara makro. Fokus utama diletakkan pada revitalisasi sistem nilai teologis demi melahirkan *Prophetic Leadership* (Kepemimpinan Profetik) yang memiliki daya tahan moral tinggi terhadap distorsi kekuasaan.

Secara sistematis, setelah bagian Pendahuluan ini, pembahasan artikel akan diurai ke dalam beberapa sub-bab inti yang terstruktur: Pertama, rekonstruksi konseptual akidah dan akhlak dalam khazanah intelektual Islam serta pelacakan historis bagaimana disorientasi makna ini mulai terjadi di era modern. Kedua, analisis kritis terhadap anatomi krisis integritas birokrasi modern dan batas-batas kemampuan pendekatan hukum legal-formal dalam membentengi moralitas pejabat. Ketiga, sintesis dan perumusan model "Internalisasi Akidah-Akhlak Progresif" sebagai tawaran solutif dari Pendidikan Islam, termasuk implementasi praktisnya dalam sistem pelatihan kedinasan dan reformasi budaya kerja birokrasi.

Melalui sistematika yang runtut dan berbasis data literatur yang kuat, artikel ini diharapkan mampu memberikan perspektif baru yang segar, ilmiah, sekaligus aplikatif bagi masa depan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai luhur ketuhanan dan kemanusiaan.

Metode

Jenis dan Pendekatan Penelitian Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) atau yang dalam tradisi akademik Islam disebut sebagai *al bahts al-maktabi*. Menurut Zed, penelitian kepustakaan adalah penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya tanpa melakukan riset lapangan. Pendekatan ini dipilih karena sifat permasalahan yang dikaji berdimensi normatif-konseptual, sehingga eksplorasi mendalam terhadap teks-teks primer (Al-Qur'an dan Hadis) dan literatur akademis sekunder merupakan cara yang paling tepat. Pendekatan analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis (*descriptive analytical approach*), yakni mendeskripsikan dan menganalisis konsep-konsep kunci dari sumber-sumber primer dan sekunder, kemudian mensintesisnya menjadi sebuah kerangka pemikiran yang koheren tentang akidah, akhlak, dan kepemimpinan publik.

2. Sumber Data Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua kategori: a. Sumber Primer Sumber primer meliputi: (a) Al-Qur'an Al-Karim beserta tafsir-tafsir mu'tabar, terutama Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab; (b) Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang dikodifikasi dalam Shahih Bukhari, Shahih Muslim, dan kitab-kitab hadis muktabar lainnya; serta (c) kitab-kitab klasik akidah dan akhlak seperti Ihya'

Uloomuddin karya Al-Ghazali. b. Sumber Sekunder Sumber sekunder terdiri dari jurnal-jurnal ilmiah bereputasi (termasuk Jurnal STAI Al Hidayah Bogor), buku-buku akademis, dan tesis/disertasi yang relevan, dengan batasan tahun terbit ke atas untuk memastikan relevansi kontemporer kajian. 3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap sumber-sumber yang telah ditetapkan. Teknik analisis data menggunakan model analisis isi (content analysis) yang dikombinasikan dengan analisis komparatif antara konsep-konsep teologis Islam dan teori-teori governance modern. Tahapan 4 analisis mencakup: (1) inventarisasi dan seleksi sumber; (2) pembacaan dan pencatatan kritis; (3) kategorisasi data berdasarkan tema-tema utama; (4) analisis dan interpretasi; serta (5) sintesis dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman). Validitas data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan data dari Al-Qur'an, hadis, karya ulama klasik, serta penelitian kontemporer mengenai kepemimpinan Islam dan integritas pejabat publik sehingga diperoleh interpretasi yang lebih komprehensif.

Hasil

Kajian ini menggunakan metode tinjauan pustaka sistematis (*systematic literature review*) yang diperkuat dengan analisis dokumen terhadap sumber-sumber primer Islam (Al-Quran, hadits) dan sumber sekunder berupa buku-buku pendidikan Islam serta jurnal-jurnal akademis. Berikut adalah temuan-temuan utama yang diorganisasikan secara tematik.

1. Pemahaman Konseptual Akidah dan Akhlak dalam Konteks Kepemimpinan Publik

Berdasarkan telaah terhadap sumber-sumber literatur yang dikaji, ditemukan bahwa mayoritas pemikir pendidikan Islam kontemporer menempatkan akidah sebagai *worldview* yang menentukan orientasi seluruh tindakan manusia, termasuk dalam kapasitasnya sebagai pemimpin publik. Mujib dan Mudzakir (2014) mendefinisikan akidah bukan sekadar pengetahuan kognitif tentang ke-Tuhanan, melainkan sebagai keyakinan yang mengikat seluruh dimensi kepribadian, pikiran, perasaan, kehendak, dan perilaku. Dalam konteks kepemimpinan, keyakinan ini menghasilkan orientasi jabatan sebagai *amanah ilahiyyah* (kepercayaan dari Allah), bukan sebagai hak istimewa atau sumber keuntungan pribadi.

Ramayulis (2015) menegaskan bahwa pendidikan Islam yang autentik tidak memisahkan pembentukan akidah dari pembentukan akhlak. Keduanya adalah dua sisi dari satu mata uang kepribadian Muslim yang sempurna (*insan kamil*). Temuan ini dikonfirmasi oleh Nata (2016) yang menyatakan bahwa lembaga-lembaga pendidikan Islam yang hanya menekankan dimensi ritual-ibadah tanpa membangun hubungan antara akidah dan perilaku sosial-publik telah gagal menunaikan fungsi tarbiyah nya yang paling mendasar.

2. Temuan tentang Nilai-Nilai Akhlak Kepemimpinan dalam Sumber Primer Islam

Telaah terhadap sumber-sumber Al-Quran dan hadits menghasilkan peta nilai akhlak kepemimpinan yang dapat dipetakan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Pemetaan Nilai Akhlak Kepemimpinan dalam Al-Quran dan Hadits

No	Nilai Akhlak	Dalil Utama	Implikasi bagi Pejabat Publik
1	<i>Shidq</i> (Kejujuran)	QS. An-Nisa: 58; HR. Bukhari-Muslim	Transparansi informasi dan laporan keuangan
2	<i>Amanah</i> (Dapat dipercaya)	QS. An-Nisa: 58; HR. Bukhari	Penggunaan wewenang untuk kepentingan publik
3	<i>Adl</i> (Keadilan)	QS. An-Nahl: 90; QS. Al-Maidah: 8	Kebijakan non diskriminatif dan berkeadilan

4	Mas'uliyah (Tanggung jawab)	HR. Bukhari-Muslim (hadits kepemimpinan)	Akuntabilitas vertikal dan horizontal
5	<i>Muraqabah</i> (Pengawasan diri)	QS. Al-Hadid: 4; QS. Al-Baqarah: 235	Integritas perilaku tanpa pengawasan eksternal
6	<i>Tawadhu'</i> (Rendah hati)	HR. Muslim; QS. Al-Furqan: 63	Kepemimpinan yang melayani, bukan memerintah

Sumber: Analisis Penulis berdasarkan *Al-Quran dan Hadits*, 2025

Temuan di atas selaras dengan hasil kajian Hidayat (2016) yang menegaskan bahwa keenam nilai tersebut merupakan satu sistem etika kepemimpinan yang terintegrasi dalam Islam bukan daftar nilai yang terpisah-pisah. Ia menyebutnya sebagai *manzhumah akhlaqiyyah* (sistem akhlak) kepemimpinan yang bersumber dari tauhid dan bermuara pada kemaslahatan umat.

3. Korelasi antara Akidah-Akhlak dan Prinsip *Good Governance*

Salah satu temuan paling signifikan dari kajian ini adalah teridentifikasinya korelasi yang sangat kuat antara nilai-nilai akidah dan akhlak Islam dengan prinsip-prinsip *good governance* yang dirumuskan oleh UNDP dan World Bank. Muhaimin (2012) dalam kajiannya tentang pengembangan pendidikan Islam menegaskan bahwa nilai-nilai Islam tentang kepemimpinan bukan hanya kompatibel dengan standar tata kelola modern, tetapi dalam banyak hal mendahuluinya secara historis.

Tabel 2. Korelasi Nilai Islam dengan Prinsip *Good Governance*

No	Nilai Islam	Prinsip <i>Good Governance</i>	Titik Temu
1	Shidq	Transparansi	Keterbukaan informasi publik yang jujur
2	Amanah	Akuntabilitas	Pertanggungjawaban kepada Allah dan rakyat
3	'Adl (Keadilan)	Kesetaraan & <i>Rule of Law</i>	Perlakuan setara tanpa diskriminasi
4	Syura (Musyawarah)	Partisipasi	Pelibatan masyarakat dalam kebijakan
5	Mas'uliyah	Efektivitas	Penggunaan sumber daya yang optimal
6	Muraqabah	Integritas internal	Perilaku etis yang intrinsik dan konsisten

Sumber: Analisis Penulis diadaptasi dari Nasir (2013) dan Muhaimin (2012)

Tabel 2 menunjukkan bahwa tidak ada satupun prinsip *good governance* modern yang tidak memiliki padanannya dalam nilai-nilai akhlak Islam. Bahkan nilai *muraqabah* dalam kesadaran permanen bahwa Allah Maha Melihat dan memberikan dimensi yang tidak dimiliki oleh konsep integritas dalam pengertian sekuler: ia tidak hanya mengatur perilaku ketika diawasi, tetapi menanamkan konsistensi perilaku dalam setiap kondisi, termasuk ketika tidak ada pengawasan eksternal sama sekali. Ini adalah keunggulan fundamental sistem etika Islam dibanding sistem etika berbasis regulasi semata (Susanto, 2015).

4. Temuan tentang Gap antara Pendidikan Islam dan Pembentukan Karakter Pemimpin

Kajian dokumen dan literatur mengidentifikasi adanya gap yang signifikan antara cita-cita pendidikan Islam dalam membentuk pemimpin berakhlak dengan realitas yang terjadi.

Berdasarkan analisis terhadap berbagai penelitian terdahulu, gap ini bersumber dari setidaknya tiga faktor struktural:

Pertama, orientasi kurikulum PAI yang terlalu menekankan dimensi kognitif (pengetahuan tentang akidah dan akhlak) tanpa membangun jembatan yang kuat ke dimensi afektif dan psikomotorik (penghayatan dan pengamalan nilai). Langgulang (2011) memperingatkan bahwa pendidikan yang hanya menyentuh akal tanpa menyentuh hati tidak akan menghasilkan perubahan karakter yang sesungguhnya.

Kedua, lemahnya keteladanan (*uswah hasanah*) dari lingkungan terdekat. Kajian Fuad (2016) menunjukkan bahwa peserta didik lebih banyak belajar karakter dari apa yang mereka lihat dibanding apa yang mereka dengar. Ketika figur-figur otoritas di lingkungan mereka tidak mencerminkan nilai akidah dan akhlak yang diajarkan, pesan pendidikan menjadi tidak kredibel.

Ketiga, tidak adanya sistem evaluasi yang mengukur perkembangan karakter secara berkelanjutan. Ramayulis (2015) menegaskan bahwa selama sistem evaluasi pendidikan Islam hanya mengukur pengetahuan kognitif, pembentukan karakter akan selalu menjadi agenda yang terpinggirkan.

Tabel 3. Identifikasi Gap Pendidikan Islam dan Pembentukan Karakter Pemimpin

No	Faktor Gap	Indikator	Dampak
1	Orientasi kurikulum kognitif	Dominasi hafalan, ujian tertulis	Pengetahuan tanpa penghayatan
2	Lemahnya keteladanan	Inkonsistensi figur otoritas	Skeptisisme nilai pada peserta didik
3	Tidak ada evaluasi karakter	Tidak ada instrumen afektif terstandar	Pembentukan karakter tidak terukur
4	Dikotomi ilmu agama-umum	Pemisahan PAI dari mata pelajaran lain	Nilai Islam tidak terintegrasi
5	Minimnya praktik nyata	Tidak ada program aksi sosial berbasis nilai	Nilai tidak termanifestasi dalam perilaku

Sumber: Analisis Penulis berdasarkan Langgulang (2011), Ramayulis (2015), Fuad (2016)

Pembahasan

1. Akidah sebagai Sistem Pengawasan Internal yang Tak Tergantikan

Temuan kajian ini menegaskan bahwa pendekatan yang paling fundamental dalam membangun integritas pejabat publik bukanlah melalui penguatan sistem pengawasan eksternal semata, melainkan melalui penanaman akidah yang menghasilkan *muraqabah*. Tasmara (2012) dengan sangat tepat menggambarkan *muraqabah* sebagai "mata batin yang tidak pernah tidur" sebuah sistem pengawasan internal yang beroperasi 24 jam penuh, di ruang publik maupun di ruang paling privat sekalipun.

Gagasan ini memiliki relevansi yang sangat tinggi dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa korupsi paling sering terjadi bukan di bawah pengawasan langsung, melainkan dalam kesendirian, dalam pertemuan tertutup, atau dalam transaksi yang sengaja disembunyikan. Sistem pengawasan eksternal sebagus apapun memiliki celah dan keterbatasan. Sementara *muraqabah* yang tertanam dari akidah tidak mengenal celah. Inilah yang oleh Nata (2016) disebut sebagai keunggulan komparatif sistem etika Islam dibanding sistem etika berbasis regulasi.

2. Akhlak sebagai Manifestasi Sosial Akidah dalam Kepemimpinan

Temuan tentang empat nilai akhlak utama yaitu *shidq*, *amanah*, *adl*, dan *mas'uliyah* menunjukkan bahwa Islam telah merumuskan sistem etika kepemimpinan yang jauh lebih komprehensif dibanding sistem etika profesi modern mana pun. Yang membedakannya secara

fundamental adalah sumber otoritasnya: etika profesi modern bersumber dari kesepakatan sosial yang dapat berubah, sementara akhlak Islam bersumber dari wahyu yang bersifat mutlak dan universal (Mujib & Mudzakir, 2014).

Implikasi praktisnya sangat nyata. Ketika standar etika bersumber dari kesepakatan sosial, maka ia rentan terhadap negosiasi dan penyesuaian ketika berhadapan dengan kepentingan. Tetapi ketika standar akhlak bersumber dari keyakinan bahwa Allah memerintahkannya dan akan menghisabnya, maka ia jauh lebih tahan terhadap godaan negosiasi. Muhaimin (2012) menyebutnya sebagai *commitment beyond compliance*, komitmen yang melampaui kepatuhan formal, yang hanya mungkin lahir dari akidah yang benar.

3. Implikasi bagi Pengembangan Pendidikan Islam

Berdasarkan seluruh temuan di atas, kajian ini merumuskan tiga implikasi utama bagi pengembangan pendidikan Islam yang berorientasi pada pembentukan pemimpin publik berintegritas:

Pertama, reformasi kurikulum PAI yang mengintegrasikan pembentukan akidah akhlak secara holistic tidak hanya sebagai mata pelajaran kognitif, tetapi sebagai program pembentukan karakter yang menyentuh seluruh dimensi kepribadian. Langgulong (2011) merekomendasikan pendekatan *total institution* dalam pendidikan Islam, di mana seluruh elemen lingkungan pendidikan dirancang untuk memperkuat internalisasi nilai akidah dan akhlak.

Kedua, penguatan sistem keteladanan (*uswah hasanah*) di seluruh jenjang lembaga pendidikan Islam. Guru, ustadz, dan pemimpin lembaga pendidikan Islam harus menjadi model hidup dari nilai-nilai yang mereka ajarkan. Ramayulis (2015) menegaskan bahwa tanpa keteladanan, seluruh kurikulum akhlak hanyalah teori yang tidak memiliki daya transformatif.

Ketiga, pengembangan program pendidikan kepemimpinan berbasis nilai Islam (*Islamic leadership development program*) yang secara spesifik ditujukan bagi calon-calon pejabat publik. Program ini harus mencakup: pembinaan akidah yang mendalam, pelatihan akhlak kepemimpinan berbasis *role model* historis Islam, dan praktik kepemimpinan terbimbing yang memungkinkan peserta menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam konteks nyata (Susanto, 2015; Hidayat, 2016).

DISKUSI

1. Akidah sebagai Fondasi Ontologis Integritas Pemimpin: Melampaui Pendekatan Regulatif

Temuan kajian ini membawa pada sebuah kesimpulan analitis yang mendasar: selama upaya pemberantasan korupsi dan penguatan integritas pejabat publik hanya bertumpu pada pendekatan hukum dan kelembagaan, hasilnya tidak akan pernah optimal. Pendekatan regulatif memiliki satu kelemahan struktural yang tidak dapat diatasi dari dalam sistem itu sendiri, yaitu ia hanya bekerja ketika ada pengawas dan sanksi yang efektif. Sementara sebagian besar tindakan koruptif justru terjadi di luar jangkauan pengawasan formal. Di sinilah akidah Islam menawarkan solusi yang secara ontologis berbeda: bukan memperkuat pengawas dari luar, melainkan menanamkan pengawas di dalam diri pemimpin itu sendiri (Muhaimin, 2012).

Konsep *muraqabah* yang lahir dari akidah yang kokoh adalah sistem pengawasan internal yang bersifat permanen dan tidak bergantung pada kondisi eksternal apapun. Seorang pejabat yang benar-benar menghayati keyakinan bahwa Allah Maha Melihat dan Maha Mencatat setiap tindakannya, sekecil apapun dan setersembunyi apapun akan secara konsisten berperilaku dengan standar yang sama, baik ketika kamera menyorotnya maupun ketika ia sendirian di ruang kerjanya. Inilah yang oleh Tasmara (2012) disebut sebagai *inner compass*, kompas batin yang tidak bisa disuap dan tidak bisa dimatikan. Dalam bahasa psikologi modern, ini adalah internalisasi nilai pada level tertinggi, *intrinsic motivation* yang bersumber bukan dari kalkulasi

untung-rugi, melainkan dari keyakinan yang paling dalam tentang siapa dirinya dan kepada siapa ia bertanggung jawab.

Analisis ini didukung oleh temuan Hidayat (2016) yang mengkaji korelasi antara intensitas pendidikan akidah seseorang dengan tingkat resistensinya terhadap godaan perilaku tidak berintegritas. Kajiannya menyimpulkan bahwa individu dengan fondasi akidah yang kuat menunjukkan pola pengambilan keputusan yang lebih konsisten secara etis, bahkan dalam situasi yang memberi peluang besar untuk menyimpang tanpa ketahuan. Ini bukan kebetulan melainkan konsekuensi logis dari sistem nilai yang bersumber dari keyakinan teologis, bukan sekadar tekanan sosial.

2. Dinamika Hubungan Akidah dan Akhlak: Dari Teori ke Praksis Kepemimpinan

Salah satu temuan paling signifikan dari kajian ini adalah konfirmasi atas hubungan dialektis antara akidah dan akhlak yang tidak dapat diputus oleh analisis yang bersifat parsial. Langgulong (2011) memformulasikan hubungan ini dengan sangat tepat: akidah yang tidak menghasilkan akhlak mulia adalah akidah yang belum sempurna penghayatannya, dan akhlak yang tidak berakar pada akidah yang benar adalah akhlak yang rapuh dan mudah berubah mengikuti situasi. Dalam konteks kepemimpinan publik, formulasi ini memiliki implikasi yang sangat praktis.

Banyak pejabat publik yang secara formal memiliki akidah Islam yaitu dengan mengucapkan syahadat, menunaikan shalat, bahkan melaksanakan ibadah haji tetapi perilaku kepemimpinannya tidak mencerminkan akhlak yang seharusnya lahir dari akidah tersebut. Paradoks ini bukan sekadar menunjukkan kelemahan individu, melainkan mengindikasikan kegagalan pendidikan Islam dalam membangun jembatan yang kuat antara keyakinan (akidah) dan perilaku (akhlak). Nata (2016) menyebut fenomena ini sebagai *fracture of religious personality* retakan kepribadian keagamaan di mana dimensi ritual dan dimensi moral tidak terintegrasi dalam satu kesatuan yang utuh.

Analisis terhadap model-model pendidikan Islam yang berhasil melahirkan pemimpin berintegritas menunjukkan satu karakteristik bersama: mereka tidak memisahkan pembinaan akidah dari pembinaan akhlak, tidak memisahkan pengetahuan dari pengamalan, dan tidak memisahkan ibadah dari muamalah. Pesantren-pesantren tradisional yang telah berabad-abad mempraktikkan model *total environment*, di mana seluruh aspek kehidupan dirancang untuk menginternalisasi nilai, sesungguhnya telah menerapkan prinsip pendidikan Islam yang paling fundamental ini jauh sebelum ia dirumuskan secara akademis (Ramayulis, 2015).

3. Relevansi Model Kepemimpinan Nabawi bagi Pejabat Publik Kontemporer

Kajian terhadap model kepemimpinan Rasulullah SAW dan para khulafaurraasyidin menghasilkan temuan yang sangat relevan bagi konteks pemerintahan kontemporer. Model kepemimpinan nabawi bukan sekadar referensi historis yang romantic ia adalah prototipe yang membuktikan bahwa integrasi akidah dan akhlak dalam kepemimpinan publik menghasilkan tata kelola yang luar biasa efektif dan bermartabat.

Kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab RA mencontohkan *accountability* yang jauh melampaui standar modern: ia secara aktif meminta rakyatnya untuk mengoreksinya jika ia menyimpang, menolak mengambil hak lebih dari baitul mal melebihi kebutuhannya, dan melakukan inspeksi lapangan secara langsung untuk memastikan keadilan ditegakkan. Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz (717–720 M) mencontohkan *good governance* yang begitu efektif sehingga para sejarawan mencatat bahwa dalam masa pemerintahannya yang singkat, tidak ada lagi mustahiq zakat yang dapat ditemukan karena tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat dramatis. Keduanya bukan produk sistem regulasi yang canggih, melainkan produk dari akidah yang kokoh dan akhlak yang benar-benar terinternalisasi (Mujib & Mudzakir, 2014).

Fuad (2016) menganalisis pola kepemimpinan historis Islam ini dan menyimpulkan bahwa terdapat tiga variabel kunci yang membedakannya dari kepemimpinan yang hanya bertumpu pada regulasi: Pertama, *intrinsic motivation* yang bersumber dari iman bukan dari kalkulasi politik atau kepentingan elektoral. Kedua, *consistency* yang lahir dari *muraqabah* perilaku yang sama dalam keadaan dilihat maupun tidak. Ketiga, *service orientation* yang lahir dari pemahaman jabatan sebagai *amanah* bukan sebagai hak.

4. Implikasi Pendidikan Islam bagi Rekonstruksi Karakter Pejabat Publik

Berdasarkan seluruh analisis di atas, kajian ini merumuskan bahwa revitalisasi pendidikan Islam yang berorientasi pada pembentukan pejabat publik berintegritas harus beroperasi pada tiga level secara simultan.

Level pertama adalah level individual membangun fondasi akidah yang kokoh melalui proses pendidikan yang tidak berhenti pada transfer pengetahuan, melainkan mendorong pengalaman spiritual yang otentik dan mendalam. Ramayulis (2015) menekankan bahwa ini membutuhkan metode-metode pendidikan yang menyentuh dimensi *qalb* (hati), bukan hanya *'aql* (akal).

Level kedua adalah level komunal membangun ekosistem sosial yang mendukung dan menopang integritas. Seorang pejabat yang berakidah dan berakhlak baik tetapi berada dalam lingkungan yang mendukung dan menormalisasi korupsi akan menghadapi tekanan yang luar biasa berat. Pendidikan Islam yang serius tentang kepemimpinan harus menghasilkan tidak hanya individu-individu berintegritas, tetapi komunitas-komunitas yang secara aktif mendukung dan menghargai integritas (Susanto, 2015).

Level ketiga adalah level institusional melembagakan nilai-nilai akidah dan akhlak Islam dalam sistem dan prosedur pemerintahan. Ini mencakup pengembangan kode etik pejabat publik yang berakar pada nilai Islam, sistem rekrutmen yang mengintegrasikan penilaian karakter secara substansial, dan mekanisme pertanggungjawaban yang bersifat komprehensif tidak hanya kepada lembaga pengawas, tetapi kepada publik dan pada akhirnya kepada Allah SWT (Nasir, 2013).

KESIMPULAN

Kajian ini mengonfirmasi bahwa akidah dan akhlak adalah pilar fundamental kepemimpinan publik dan good governance. Akidah yang kokoh melahirkan muraqabah (sistem kontrol internal), sementara akhlak mulia menjadi manifestasi konkretnya dalam kebijakan. Nilai Islam tidak hanya sejalan dengan prinsip tata kelola modern, tetapi juga memberikan dimensi spiritual yang bersumber dari keyakinan teologis yang mengakar, bukan sekadar kesepakatan pragmatis.

Namun, terdapat gap nyata antara idealitas pendidikan Islam dan realitas karakter pejabat publik. Masalah utama terletak pada kegagalan sistem pendidikan dalam menjembatani akidah sebagai keyakinan dan akhlak sebagai perilaku.

Oleh karena itu, konsekuensi logis ke depan menuntut transformasi paradigma: dari sekadar transmisi pengetahuan agama menjadi pendidikan yang mentransformasi karakter. Reformasi ini harus diwujudkan melalui reorientasi kurikulum berbasis pembiasaan, pengembangan program kepemimpinan publik yang spiritual, serta standardisasi keteladanan (uswah hasanah) pendidik secara holistik.

Pertama, Pembentukan akidah dan akhlak di seluruh jenjang pendidikan Islam tidak boleh sekadar menjadi mata pelajaran teoritis. Pendekatan parsial ini sering kali hanya menghasilkan hafalan materi demi mengejar nilai akademik di atas kertas.

Untuk itu, nilai tauhid dan keluhuran budi pekerti harus diintegrasikan sebagai program pembiasaan (habitiasi) yang nyata. Nilai ini wajib melandasi seluruh ekosistem sekolah, termasuk dalam pembelajaran sains dan sosial.

Melalui pendekatan holistik, dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik anak didik dapat tersentuh secara seimbang. Akidah berfungsi sebagai akar keimanan yang kokoh, sedangkan akhlak menjadi buah manis dalam interaksi sosial.

Pada akhirnya, integrasi ini menciptakan benteng spiritual yang kuat bagi generasi muda di tengah arus modernisasi. Pendidikan Islam pun berhasil melahirkan pribadi utuh (kaffah) yang membawa kemaslahatan bagi lingkungan sekitar.

Kedua, Lembaga pendidikan Islam bertanggung jawab mendesain program kepemimpinan khusus yang terstruktur. Program ini harus diilhami oleh prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam yang luhur seperti keadilan, amanah, dan musyawarah.

Calon pemimpin publik masa depan tetap wajib menguasai kompetensi teknis seperti manajemen strategis dan analisis kebijakan. Namun, kecakapan teknokratis tersebut harus dikendalikan oleh kecerdasan spiritual yang matang.

Kekokohan spiritual inilah yang melahirkan integritas tanpa kompromi. Ketika dididik untuk selalu merasa diawasi oleh Allah (muraqabah), pemimpin akan memiliki benteng moral yang kuat untuk menolak korupsi dan kezaliman.

Selain itu, kemuliaan akhlak seperti sifat shiddiq, amanah, tabligh, dan fathanah harus mewujud dalam gaya kepemimpinan mereka. Kombinasi ini melahirkan generasi negarawan muslim yang visioner, bersih, dan melayani umat.

Ketiga, Metodologi pendidikan karakter yang paling efektif bukanlah ceramah satu arah, melainkan visualisasi nilai secara nyata. Anak-anak adalah peniru ulung yang menyerap lebih banyak dari apa yang mereka lihat daripada yang didengar.

Oleh karena itu, guru dan staf pendidikan harus memposisikan diri sebagai pendidik (transfer of values). Kontradiksi antara ucapan dan perbuatan guru hanya akan menghancurkan kepercayaan di benak anak didik.

Keteladanan ini bekerja secara alami melintasi ruang bawah sadar anak. Saat menyaksikan guru konsisten beribadah tepat waktu dan bersikap santun, anak melihat bahwa nilai Islam sangat indah untuk dipraktikkan.

Dalam skala luas, metode ini menuntut keselarasan perilaku antara guru di sekolah, orang tua di rumah, dan tokoh masyarakat. Ketika ekosistem keteladanan terbentuk, internalisasi akhlak mulia akan tercapai secara otomatis.

REFERENSI

- Abdurrahman, M. (2014). Etika pemerintahan Islam: *Kajian terhadap konsep amanah dan keadilan*. Jurnal Islamica, 9(1), 112-138. <https://doi.org/10.15642/islamica.2014.9.1.112-138>
- Ainiyah, N. (2013). *Pembentukan karakter melalui pendidikan agama Islam*. Jurnal Al-Ulum, 13(1), 25-38.
- Azra, A. (2012). Pendidikan Islam: *Tradisi dan modernisasi di tengah tantangan milenium III*. Jurnal Lektur Keagamaan, 10(2), 245-268.
- Buseri, K. (2014). *Nilai-nilai ilahiyah dalam pembentukan karakter pemimpin*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam, 14(2), 51-78.
- Dacholfany, M. I. (2015). *Reformasi pendidikan Islam dalam menghadapi era globalisasi*. Jurnal Akademika, 20(1), 173-194. <https://doi.org/10.32332/akademika.v20i1.498>
- Fuad, A. J. (2016). *Integrasi nilai akhlak dalam pendidikan Islam kontemporer*. Jurnal Pendidikan Islam, 5(2), 235-258. <https://doi.org/10.14421/jpi.2016.52.235-258>
- Gunawan, H. (2013). *Kurikulum dan pembelajaran pendidikan agama Islam*. Jurnal Pendidikan Agama Islam, 11(1), 1-22.
- Hidayat, R. (2016). *Akidah sebagai fondasi kepemimpinan publik dalam Islam*. Jurnal Tarbiyah, 23(1), 75-98. <https://doi.org/10.30829/tar.v23i1.77>
- Ismail, S. M. (2013). *Akhlak pemimpin dalam perspektif Al-Quran dan hadits*. Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, 8(2), 217-244.
- Langgulang, H. (2011). *Asas-asas pendidikan Islam* (Ed. revisi). Jakarta: Al-Husna Zikra.

- Mahfud, C. (2014). *Kepemimpinan etis dalam Islam: Relevansinya dengan good governance*. Jurnal Islamica, 8(2), 267-284. <https://doi.org/10.15642/islamica.2014.8.2.267-284>
- Muhaimin. (2012). *Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mujib, A., & Mudzakir, J. (2014). *Ilmu pendidikan Islam* (Ed. 3). Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Nasir, M. (2013). *Konsep amanah dalam Islam dan implikasinya bagi tata kelola pemerintahan*. Jurnal Islamica, 7(2), 317-356. <https://doi.org/10.15642/islamica.2013.7.2.317-356>
- Nata, A. (2016). *Ilmu pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Noer, K. A. (2012). Akhlak politik: *Etika kepemimpinan dalam perspektif Islam*. Jurnal Pemikiran Islam, 1(1), 45-72.
- Putra, H. D. A. (2014). *Muraqabah dan integritas kepemimpinan: Kajian tematik hadits tarbawi*. Jurnal Pendidikan Islam, 3(2), 255-280. <https://doi.org/10.14421/jpi.2014.32.255-280>
- Ramayulis. (2015). *Ilmu pendidikan Islam* (Ed. revisi). Jakarta: Kalam Mulia.
- Sulaiman. (2014). Konsep tanggung jawab pemimpin dalam Al-Quran dan hadits. *Jurnal At-Ta'dib*, 9(1), 47-68.
- Susanto, E. (2015). Korupsi dan etika Islam: Perspektif akidah dan akhlak. *Jurnal Nuansa*, 12(1), 89-130.
- Syamsuddin, M. A. (2016). Pendidikan karakter berbasis akidah Islamiyah. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 6(2), 145-162. <https://doi.org/10.21831/jpk.v6i2.12047>
- Tasmara, T. (2012). *Membudayakan etos kerja Islami*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Uhbiyati, N. (2013). Konsep *insan kamil* dalam pendidikan Islam. *Jurnal Al-Tarbiyah*, 1(1), 1-18.
- Zuhri, A. M. (2015). Integritas pejabat publik dalam perspektif fiqh siyasah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2), 347-372.